

Abstrak

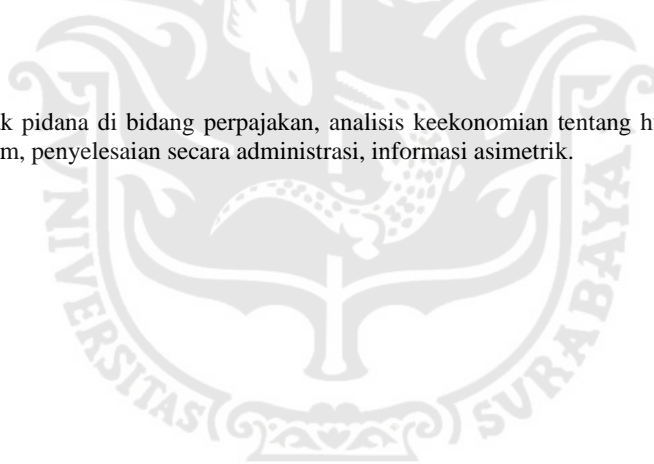
Pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam Pasal 38, 39, dan 39A Undang-Undang No 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Namun demikian, dalam perkembangannya tindak pidana perpajakan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai efektivitas rumusan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Penelaahan terhadap rumusan tindak pidana di bidang perpajakan dalam UU KUP menunjukkan adanya kerancuan antara aspek administrasi dan pidana karena hampir semua perbuatan yang dilarang dalam UU KUP tersebut dapat diselesaikan dengan jalur administrasi yaitu dengan penerbitan ketetapan pajak. Kerancuan lain juga terjadi antara tindak pidana perpajakan dengan tindak pidana umum seperti misalnya pemalsuan dan penggelapan. Analisis tindak pidana juga menunjukkan bahwa rumusan itu tidak mencakup korporasi sebagai subjek hukum pidana di bidang perpajakan.

Penerapan analisis keekonomian tentang hukum menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana untuk perbuatan yang dapat diselesaikan secara administrasi adalah tidak efisien karena pengeluaran *criminal justice system* yang signifikan dan adanya potensi hilangnya penerimaan pajak apabila sanksi pidana diterapkan tanpa perhitungan yang cermat. Analisis ekonomi keperilakuan terhadap rumusan tindak pidana yang dihubungkan dengan struktur penegak hukum pidana di bidang perpajakan yang secara signifikan ditangani oleh satu institusi yang sama (Direktorat Jenderal Pajak) mengarah pada informasi asimetrik yang dapat menimbulkan perilaku ketidakpatuhan sebagai strategi yang dominan.

Hasil penelitian ini menegaskan perlunya kajian ulang terhadap rumusan tindak pidana di bidang perpajakan dan struktur penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Akhirnya, penelitian ini menekankan prinsip dasar bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti bahwa penggunaan ketentuan pidana diperkenankan apabila penyelesaian secara administratif tidak dapat dicapai.

Kata kunci : tindak pidana di bidang perpajakan, analisis keekonomian tentang hukum, keperilakuan ekonomi dan hukum, penyelesaian secara administrasi, informasi asimetrik.



Abstract

Criminal provisions in the field of taxation conducted by the taxpayer stipulated in Article 38, 39, and 39A Law No 6 Year 1983 as lastly amended by Law No 16 Year 2009 regarding the General Provision of Taxes (UU KUP) are intended to deter the occurrence of tax criminal conduct. However, the recent development shows that the trend of tax crime is increasing. This fact raises a question on whether the provisions in the tax criminal conduct are effective.

A review on the provisions of tax criminal conduct in the General Provision of Taxes Law shows an ambiguity between the administrative aspect and criminal aspect because almost all of the conducts which are prohibited in the Law can be settled through administrative procedures by the issuance of tax assessment letters. Another ambiguity occurs between tax crime and the general crime such as counterfeiting and embezzling. Criminal law analysis also reveals that the provision does not cover corporations as criminal law subject in the field of taxation.

Implementation of economic analysis of law shows that the use of criminal sanction for any conduct which can be settled administratively is inefficient because of the significant criminal justice system expenditure and the possibility of the lost tax collection if the criminal sanction is used without any thorough consideration. Behavioral economics analysis on the tax criminal provision combined with the structure of law enforcer in the tax crime handled solely by the same institution (The Directorate General of Taxes) may lead to the asymmetric information. Asymmetric information finally results in the non-compliance behaviors as dominant strategy.

The result of this research confirms the need to review the tax criminal provisions and the structure of law enforcement in the field of taxation. Finally, this research emphasizes the basic principle of *ultimum remedium* as applied in the criminal law which means that the use of criminal provisions may be allowed as long as the administrative mechanisms cannot be achieved.

Keywords: criminal conducts in the field of taxation, economic analysis of law, behavioral law and economics, administrative settlement, asymmetric information.

